

SINOPSIS

Kebijakan publik merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan, dengan tindakan terbaik dan tindakan terarah. Hal ini sangat penting untuk mengatasi kemunduran penyelenggaraan administrasi publik, karena masyarakat umum bukan hanya menilai apa yang dilaksanakan oleh para administrator publik saja, tetapi juga apa yang tidak dilaksanakan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan KTP dan akta gratis di Kabupaten Bantul, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian statistik deskriptif karena penulis menggunakan dua metode penelitian yaitu metode diskriptif kualitatif yang bersifat pemaparan dan memperoleh gambaran lengkap tentang obyek yang diteliti dalam menggunakan data, dan metode diskriptif kuantitatif untuk meringkas data yang jumlahnya banyak ialah dengan menggunakan rata-rata, dan menggunakan analisis indeks. Selanjutnya data diperoleh melalui dokumentasi, dan wawancara secara langsung dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Penyuluhan, dan wawancara wawancara dengan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Dan untuk memperkuat data juga dilakukan penyebaran kuesioner dengan responden sebanyak 50 orang yang ditujukan kepada masyarakat Bantul sebagai penerima program pelaksanaan pembuatan KTP dan Akta gratis.

Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa dengan adanya pelaksanaan pembuatan KTP dan Akta gratis tersebut adanya peningkatan di bidang administrasi kependudukan, yang mana masyarakat telah ikut berpartisipasi dengan baik di dalam memenuhi kewajiban mereka sebagai masyarakat yang taat hukum dan peraturan, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut telah tepat sasaran yang mana telah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, yang mudah, tepat dan cepat. Ada beberapa factor yang mempengaruhi diantaranya komunikasi yaitu antara pelaksana dengan masyarakat berjalan dengan baik, berikutnya sumber daya yaitu kesiapan dan kualitas yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul juga telah memenuhi syarat, selanjutnya adalah sikap pelaksana dimana berdasarkan penilaian masyarakat terhadap pelaksana juga baik, dan yang terakhir adalah struktur birokrasi dimana dukungan dari birokrasi sangat dibutuhkan untuk kesuksesan pelaksanaan pembuatan KTP dan Akta gratis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembuatan KTP dan Akta gratis sudah berjalan dengan baik. Sosialisasi yang dilakukan aparat berjalan cukup baik karena dari hasil kuesioner sebanyak 3.70 hasil dari rata-rata indeks keseluruhan antar aspek mengatakan pelayanan yang diberikan dari segi komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi berjalan baik. Walaupun dari pelaksanaan pembuatan KTP dan Akta gratis termasuk dalam kategori "baik" yaitu dengan indeks 3,70 tetapi angka tersebut bukan angka akhir karena masih bisa terus ditingkatkan bagi para pelaksana untuk terus memperbaikinya.

Rekomendasi yang diberikan secara garis besar yaitu pertama, perlu ditingkatkan sosialisasi dalam pelaksanaan pembuatan KTP dan Akta gratis, kedua didalam memberikan informasi seharusnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus tepat dalam menggunakan media yang digunakan dalam memberikan informasi kepada masyarakat, sehingga tidak ada ketimpangan dalam pelaksanaannya pembagian tugas dan fungsi harus jelas kepada masing-masing walaupun banyak program yang juga memerlukan penanganan yang